Support By :

JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA
e-ISSN: 2777-015X., *DOI: https://doi.org/10.52046/jssh.v6i2.270-278*
Web: https://journal.tyarlyta.com/index.php/jssh
E-mail: jurnaljssh.ummu@gmail.com

Collaborative Governance in Developing Wonokitri Tourism Village toward Village Self-Reliance

(Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Wonokitri Menuju Kemandirian Desa Wisata)

Mariatul Qibtia[1]✉ dan Agus Prianto[1]

[1] *Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia.*

✉ Email: nrlkrsma20@gmail.com

Info Artikel :	☑ Artikel Penelitian	☐ Artikel Pengabdian	☐ Riview Artikel
Diterima : 9 Sept. 2026,	*Disetujui : 26 Okt. 2026,*	*Publikasi On-Line : 6 Nov. 2026*	

Abstract

This study analyzes the collaborative governance process in the development of Wonokitri Tourism Village, Tosari District, Pasuruan Regency, and its contribution to tourism village self-reliance. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving the village government, the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), the Tengger customary institution, the Bromo Tengger Semeru National Park Authority (TNBTS), the Pasuruan Regency Tourism Office, and local business actors, and were analyzed using Miles and Huberman's interactive model. Applying Ansell and Gash's (2008) collaborative governance framework, the findings show that Wonokitri possesses strong starting conditions – a strategic gateway location to Mount Bromo, natural and Tengger cultural assets, and the Edelweiss ecotourism initiative – that have attracted multi-actor involvement from the village government, the village-owned enterprise (BUMDes), Pokdarwis, TNBTS, academics, and the media. Institutional design has developed through BUMDes and Pokdarwis, while facilitative leadership is distributed across the village government, Pokdarwis, and TNBTS rather than concentrated in a single actor. The collaborative process, built through communication, trust, and shared understanding, has produced concrete outcomes such as the Edelweiss attraction, guide capacity-building, and digital promotion. However, self-reliance remains only partially achieved: agriculture still dominates household income, human resource capacity and digital promotion remain limited, and the village still relies on external actors. Wonokitri is therefore best characterized as moving toward, rather than having fully achieved, tourism village self-reliance.

🕮 ***Keyword: Collaborative Governance; Tourism Village; Village Self-Reliance; Community-Based Tourism; Wonokitri.***

I. PENDAHULUAN

Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan masyarakat perdesaan. Pariwisata tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sektor rekreasi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pemerintah terus mendorong pengembangan desa wisata sebagai bagian dari agenda penguatan ekonomi berbasis

masyarakat, dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pengembangan potensi wisata di wilayahnya (Titania et al., 2022).

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian desa melalui pemanfaatan sumber daya alam, budaya, dan potensi lokal. Desa wisata tidak hanya berfungsi sebagai destinasi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dalam dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan desa wisata sangat bergantung pada pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah desa, masyarakat, dan aktor terkait. Kebijakan tidak akan mencapai tujuannya tanpa pelaksanaan yang efektif serta dukungan para pemangku kepentingan (Fasa et al., 2022).

Dinamika global mendorong perubahan paradigma pembangunan pariwisata, dari pariwisata massal yang cenderung eksploitatif menuju pariwisata berkelanjutan yang berakar pada potensi lokal. Perubahan tersebut menuntut birokrasi publik untuk bersikap adaptif. Pemerintah tidak lagi cukup mengandalkan pola pemerintahan yang sentralistis dan instruktif, tetapi perlu berperan sebagai fasilitator yang mampu menghubungkan potensi lokal dengan kebutuhan pasar yang lebih luas (Fasa et al., 2022). Dalam kajian administrasi publik, perubahan ini sejalan dengan pergeseran paradigma menuju New Public Governance, yang menempatkan pemerintah bukan sebagai satu-satunya aktor penyelesaian masalah publik. Keberhasilan kebijakan semakin ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengelola jejaring, membangun kemitraan strategis, dan melibatkan aktor nonpemerintah secara bermakna (Grandis et al., 2023).

Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, merupakan salah satu wilayah yang memperlihatkan dinamika tersebut. Secara geografis, Wonokitri memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu masuk bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan pariwisata Gunung Bromo dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Posisi tersebut memberikan peluang bagi desa untuk tidak hanya menjadi jalur transit, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi melalui pengembangan kelembagaan desa wisata. Selain keunggulan geografis, Wonokitri memiliki kekayaan sosial budaya sebagai wilayah masyarakat adat Tengger yang masih mempertahankan tata adat, tradisi leluhur, dan hukum adat. Perpaduan keindahan alam pegunungan dengan kekayaan budaya Tengger membentuk identitas wisata yang khas. Masyarakat juga mengembangkan inisiatif wisata Edelweiss yang menghubungkan upaya konservasi tanaman dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Risfandini et al., 2023).

Keunikan tersebut mempertemukan berbagai aktor dengan kepentingan dan kewenangan yang berbeda. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan konservasi; Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui perangkat daerah bidang pariwisata menjalankan urusan pengembangan pariwisata daerah; Pemerintah Desa Wonokitri memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat; sedangkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan lembaga adat berperan dalam pengembangan wisata sekaligus menjaga nilai-nilai lokal masyarakat Tengger (Grandis et al., 2023).

Naskah awal mengidentifikasi kemungkinan adanya tantangan koordinasi antara otoritas konservasi, kelembagaan desa, pelaku usaha wisata, dan aktor adat. Kemungkinan tersebut perlu diperlakukan sebagai isu yang harus diverifikasi, bukan sebagai temuan yang telah terbukti. Pernyataan mengenai kendala koordinasi hanya dapat dipertahankan sebagai temuan apabila didukung catatan wawancara, hasil observasi, atau dokumen resmi yang dapat diidentifikasi.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Wonokitri serta keterkaitannya dengan kemandirian desa wisata. Fokus penelitian mencakup tiga pertanyaan: (1) bagaimana empat dimensi model Ansell dan Gash (2008) tampak dalam proses kolaborasi; (2) faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kolaborasi; dan (3) bukti apa yang menunjukkan tingkat kemandirian desa wisata. Kontribusi kajian ini terletak pada penerapan kerangka collaborative governance dalam konteks pengembangan desa wisata yang dipengaruhi oleh kelembagaan adat Tengger dan tata kelola konservasi. Klaim kebaruan tersebut tetap perlu dipastikan melalui perbandingan sistematis dengan penelitian terdahulu.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif untuk mengkaji pengalaman para pemangku kepentingan dan hubungan antaraktor dalam tata kelola Desa Wisata Wonokitri. Naskah ini mencantumkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen sebagai metode pengumpulan data. Untuk

menjamin transparansi, naskah akhir perlu menjelaskan periode penelitian, jumlah dan karakteristik informan, prosedur pemilihan informan, durasi wawancara, proses perekaman dan transkripsi, kegiatan observasi, dokumen yang ditelaah, serta prosedur etika penelitian. Rincian tersebut harus diisi berdasarkan catatan penelitian yang benar-benar tersedia.

Lokasi penelitian adalah Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, dengan fokus wilayah Dusun Sanggar dan Dusun Wonokitri sebagaimana disebutkan dalam naskah awal. Naskah akhir perlu mencantumkan tanggal pelaksanaan penelitian dan alasan pemilihan lokasi. Teknik pemilihan informan perlu disebut sebagai purposive sampling atau snowball sampling hanya apabila teknik tersebut memang digunakan dalam penelitian.

Data primer dilaporkan diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi langsung. Data sekunder dapat mencakup dokumen perencanaan desa, peraturan desa yang relevan, keputusan pengelolaan pariwisata, dokumen zonasi TNBTS, perjanjian kerja sama, rencana dinas pariwisata, dan laporan pendapatan desa. Namun, naskah akhir hanya boleh mencantumkan dokumen yang benar-benar diperoleh dan ditelaah. Setiap dokumen perlu diidentifikasi berdasarkan judul, instansi penerbit, nomor (jika ada), dan tahun penerbitan.

Tabel 1. Informan Penelitian

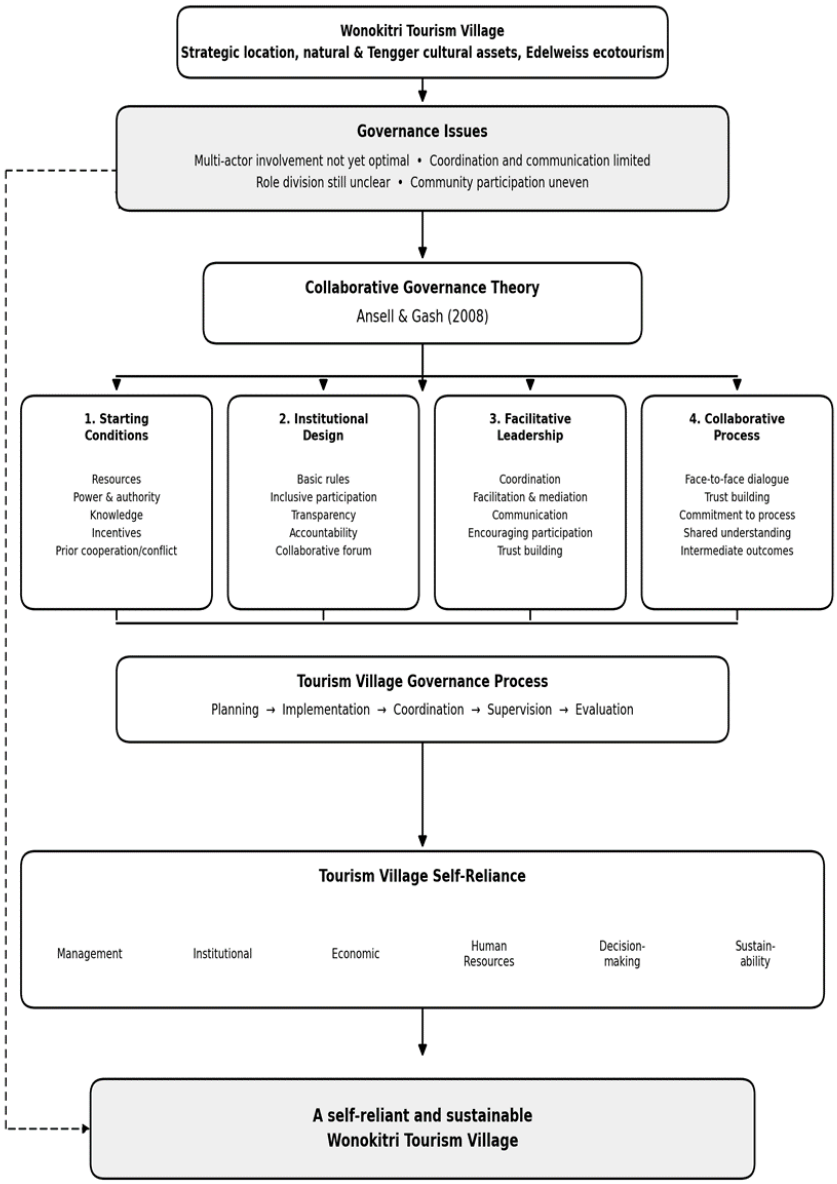
Kategori Informan	Institusi/Peran	Kode dan Jumlah	Kriteria Pemilihan/ Keterlibatan
Pemerintah desa	Kepala desa/perangkat desa	[Isi kode dan jumlah informan sebenarnya]	Jelaskan peran dan kriteria inklusi
Pengelola pariwisata	Pokdarwis/pengelola wisata	[Isi kode dan jumlah informan sebenarnya]	Jelaskan peran dan lama keterlibatan
Lembaga adat	Perwakilan masyarakat adat Tengger	[Isi kode dan jumlah informan sebenarnya]	Jelaskan peran dan kriteria inklusi
Otoritas konservasi	Perwakilan TNBTS	[Isi kode dan jumlah informan sebenarnya]	Jelaskan peran dan kriteria inklusi
Pemerintah daerah	Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan	[Isi kode dan jumlah informan sebenarnya]	Jelaskan peran dan kriteria inklusi
Pelaku usaha/masyarakat lokal	Hanya aktor yang benar-benar diwawancarai	[Isi kode dan jumlah informan sebenarnya]	Sebutkan peran; hapus kategori jika tidak diwawancarai

Pengumpulan data dijelaskan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam naskah akhir, penerapan setiap metode perlu dijelaskan secara konkret, termasuk kategori pemangku kepentingan yang diwawancarai, aktivitas dan lokasi yang diamati, serta dokumen yang ditelaah. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan dari kelompok informan yang berbeda, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, catatan observasi, dan bukti dokumenter. Persetujuan informan, anonimisasi, dan prosedur etik perlu dilaporkan sesuai pelaksanaan yang sebenarnya.

Analisis data disusun berdasarkan tahapan interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Naskah akhir perlu menjelaskan apakah pengodean dilakukan secara deduktif dengan menggunakan empat dimensi Ansell dan Gash, secara induktif dengan mengembangkan tema dari data, atau melalui kombinasi keduanya. Proses pembentukan kode, penanganan perbedaan keterangan, dan pemeriksaan kesimpulan terhadap catatan wawancara, observasi, serta dokumen juga perlu dijelaskan. Klaim mengenai kejenuhan data tidak boleh dicantumkan apabila tidak didukung catatan penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tahapan interaktif yang lazim digunakan dalam model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Naskah akhir perlu menjelaskan apakah pengodean dilakukan secara deduktif dengan menggunakan empat dimensi Ansell dan Gash, secara induktif dengan mengembangkan tema dari data, atau melalui kombinasi keduanya. Proses pembentukan kode, penanganan perbedaan keterangan, dan pemeriksaan kesimpulan terhadap catatan wawancara, observasi, serta dokumen juga perlu dijelaskan. Klaim mengenai kejenuhan data tidak boleh

dicantumkan apabila tidak didukung catatan penelitian.



Gambar 1. Kerangka konseptual collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Wonokitri

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Desa Wonokitri

Desa Wonokitri terletak di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, di kawasan dataran tinggi Tengger dan wilayah pariwisata yang berkaitan dengan Gunung Bromo. Posisi geografis desa relevan untuk memahami peluang dan kebutuhan tata kelola dalam pengembangan pariwisata. Klaim mengenai arus kunjungan wisatawan, status konservasi, dan penetapan resmi desa sebagai desa wisata perlu didukung sumber resmi yang mencantumkan tahun atau tanggal penerbitan.

Naskah ini menggambarkan pertanian hortikultura sebagai mata pencaharian yang telah lama dijalankan masyarakat. Kegiatan terkait pariwisata, seperti jasa jeep, pemandu wisata, homestay, usaha kuliner, dan kerajinan, disebut sebagai pilihan mata pencaharian tambahan. Pernyataan tersebut perlu didukung statistik resmi desa atau penelitian yang dapat diidentifikasi. Praktik budaya dan kelembagaan adat harus dijelaskan secara proporsional serta merujuk pada sumber yang dapat diverifikasi; keberadaannya tidak dengan sendirinya menjadi bukti bahwa kolaborasi telah berjalan efektif.

Naskah mengidentifikasi Taman Edelweiss Wonokitri sebagai salah satu daya tarik wisata utama serta menyebut pengalaman wisata alam dan budaya sebagai pendukung. Status operasional terkini, pengaturan pengelolaan, dan

pengakuan resmi terhadap objek wisata tersebut perlu diverifikasi melalui dokumen bertanggal atau observasi lapangan. Klaim mengenai peringkat dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) harus merujuk pada pengumuman resmi yang relevan dan tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa seluruh dimensi tata kelola telah memenuhi standar nasional.

Naskah menyebut Pokdarwis yang berkaitan dengan pengelolaan Edelweiss Wonokitri serta kerja sama antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan TNBTS. Pada naskah akhir, instrumen hukum yang menjadi dasar kerja sama perlu disebutkan secara tepat, termasuk nomor dan tanggal apabila tersedia. Pembagian tanggung jawab yang tercantum dalam dokumen formal perlu dibedakan dari peran yang benar-benar dijalankan dalam praktik.

3.2 Kondisi Awal

Dalam kerangka Ansell dan Gash (2008), kondisi awal mencakup hubungan antaraktor pada masa sebelumnya, insentif untuk berpartisipasi, ketimpangan kekuasaan dan sumber daya, serta sumber daya yang dimiliki masing-masing pemangku kepentingan. Posisi geografis Wonokitri serta potensi alam dan budayanya dapat menjadi insentif untuk berkolaborasi, tetapi hal tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kolaborasi telah berlangsung secara inklusif dan efektif. Analisis perlu menggunakan bukti wawancara yang telah diberi kode dan dokumen yang relevan untuk menjelaskan alasan setiap aktor berpartisipasi serta sumber daya atau kewenangan yang dimilikinya.

Naskah mengidentifikasi pemerintah desa, Pokdarwis, BUMDes, TNBTS, masyarakat, pelaku usaha wisata, akademisi, dan media sebagai aktor yang berpotensi terkait. Naskah akhir perlu membedakan aktor yang benar-benar diwawancarai atau diamati dari pihak yang hanya disebut dalam literatur sekunder. Analisis juga perlu menguraikan perbedaan kewenangan formal, pendanaan, keahlian, akses informasi, dan posisi tawar setiap aktor berdasarkan bukti yang spesifik.

Draf saat ini merujuk pada penelitian terdahulu mengenai akses pelatihan, keterampilan usaha, dan komposisi pendapatan rumah tangga. Angka-angka tersebut merupakan bukti sekunder, bukan temuan primer penelitian ini. Persentase hanya dapat dipertahankan setelah sumber, sampel, tahun, dan metode penelitian asal diverifikasi. Jika tidak dapat diverifikasi, angka tersebut perlu dihapus dan tidak boleh digeneralisasi kepada seluruh warga Wonokitri.

3.3 Desain Kelembagaan

Dalam kerangka Ansell dan Gash (2008), desain kelembagaan berkaitan dengan aturan dasar, inklusivitas, transparansi, dan pengorganisasian forum kolaborasi. Dalam konteks Wonokitri, analisis perlu mengidentifikasi forum yang benar-benar digunakan, aturan partisipasi, pihak yang diundang dan hadir, mekanisme pengambilan keputusan, serta cara keputusan dan anggaran diinformasikan. Keberadaan struktur organisasi formal saja belum cukup untuk membuktikan bahwa proses kolaborasi berlangsung inklusif.

Naskah mengidentifikasi BUMDes dan Pokdarwis sebagai kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata. Tanggal pembentukan, status terkini, mandat, dan kegiatan aktual kedua lembaga perlu diverifikasi melalui surat keputusan, peraturan desa, notulen rapat, atau wawancara. Analisis perlu menunjukkan apakah pembagian tanggung jawab telah berjalan secara jelas serta apakah terdapat masalah koordinasi atau tumpang tindih peran yang dilaporkan oleh aktor berbeda.

Partisipasi masyarakat perlu dinilai dengan mengidentifikasi kelompok yang terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pembagian manfaat. Naskah akhir perlu melaporkan bukti keterwakilan perempuan, pemuda, pelaku usaha mikro, dan perwakilan masyarakat adat apabila informasi tersebut memang dikumpulkan. Akses digital terhadap informasi wisata perlu dianalisis secara terpisah dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan kolaboratif.

3.4 Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam kerangka Ansell dan Gash (2008), kepemimpinan fasilitatif mencakup kemampuan mempertemukan para aktor, membuka ruang dialog, mengelola konflik, dan membantu peserta yang memiliki sumber daya lebih terbatas agar dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Analisis perlu mengidentifikasi pihak yang menyelenggarakan pertemuan, cara perbedaan pendapat ditangani, serta tindakan konkret untuk menyeimbangkan partisipasi. Penyediaan infrastruktur saja tidak cukup untuk membuktikan adanya kepemimpinan fasilitatif.

Draf menyebut infrastruktur pendukung pariwisata dan peran pemerintah desa, Pokdarwis, serta TNBTS. Klaim mengenai infrastruktur tertentu hanya dapat dipertahankan apabila didukung catatan observasi atau dokumen resmi. Untuk menunjukkan kepemimpinan fasilitatif, perlu disajikan contoh konkret dialog, mediasi, penyelesaian konflik, atau dukungan

kepada aktor yang memiliki posisi lebih lemah, disertai kode informan atau rujukan dokumen.

Draf menyebut pelatihan keterampilan komunikasi bagi pemandu lokal. Penyelenggara, tanggal, peserta, materi, dan bukti hasil pelatihan perlu dijelaskan apabila informasi tersebut terdokumentasi. Jika tidak, pelatihan hanya dapat disebut sebagai inisiatif yang dilaporkan, dengan penjelasan bahwa dampaknya terhadap kualitas pelayanan belum dapat dipastikan berdasarkan bukti yang tersedia.

3.5 Proses Kolaborasi

Dimensi proses kolaborasi mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara (Ansell & Gash, 2008). Setiap unsur perlu dianalisis berdasarkan bukti lapangan, bukan disimpulkan hanya dari keberadaan program pariwisata. Naskah akhir perlu menyajikan contoh pertemuan atau keputusan yang benar-benar terjadi, termasuk perbedaan pendapat atau koordinasi yang terhenti apabila hal tersebut ditemukan dalam data.

Draf mengidentifikasi komunikasi antara kelembagaan desa dan pemangku kepentingan lainnya sebagai hal penting. Untuk mendukung pernyataan tersebut, naskah perlu menjelaskan mekanisme komunikasi yang benar-benar digunakan, misalnya rapat atau forum koordinasi yang terdokumentasi, frekuensi pertemuan jika diketahui, aktor yang terlibat, isu yang dibahas, dan keputusan yang dihasilkan. Perbedaan pandangan antar-informan juga perlu disampaikan apabila keterangannya tidak sejalan.

Pelestarian nilai budaya Tengger dan lingkungan dapat menjadi kepentingan bersama para pemangku kepentingan. Namun, pemahaman bersama harus dibuktikan melalui pernyataan wawancara, notulen pertemuan, atau rencana yang disepakati bersama. Naskah akhir perlu menjelaskan keputusan atau praktik spesifik yang menunjukkan bagaimana konservasi, mata pencaharian, dan nilai adat dipertimbangkan secara bersamaan.

3.6 Kemandirian Desa Wisata

Dalam artikel ini, kemandirian pengelolaan dipahami sebagai kapasitas lokal untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan menjalankan kegiatan pariwisata melalui kelembagaan yang berfungsi. Keberadaan BUMDes atau Pokdarwis saja tidak cukup untuk membuktikan kemandirian. Analisis perlu menilai kewenangan pengambilan keputusan, kapasitas operasional, keberlanjutan pengelolaan, dan ketergantungan terhadap bantuan pihak luar dengan menggunakan indikator yang jelas serta bukti terdokumentasi.

Kemandirian ekonomi dapat dinilai melalui bukti pendapatan pariwisata yang tinggal di tingkat lokal, keterlibatan rumah tangga, keberlanjutan usaha, kesempatan kerja, serta perubahan pendapatan atau pendapatan asli desa dari waktu ke waktu apabila tersedia. Draf menyebut homestay, transportasi, usaha kuliner, pemanduan, dan kerajinan, tetapi peluang usaha tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan peningkatan pendapatan tanpa data pembanding yang mendukung.

Kapasitas sumber daya manusia dapat dikaji melalui pelatihan yang relevan, keterampilan yang tersedia di tingkat lokal, dan kemampuan warga dalam mengelola layanan pariwisata. Naskah akhir perlu mengidentifikasi sumber informasi pelatihan dan tidak menyatakan bahwa keterampilan telah meningkat apabila tidak terdapat bukti hasil. Jika pengukuran langsung tidak tersedia, hal tersebut perlu dinyatakan sebagai keterbatasan penelitian.

3.7 Sintesis: Tata Kelola dan Kemandirian Desa Wisata

Empat dimensi dalam kerangka Ansell dan Gash (2008) menjadi struktur analisis untuk mengkaji kolaborasi. Kemandirian desa wisata merupakan konsep hasil yang berbeda sehingga memerlukan indikator operasional tersendiri. Dalam artikel ini, dimensi yang diusulkan meliputi kapasitas pengelolaan, manfaat ekonomi lokal, kapasitas sumber daya manusia, otonomi pengambilan keputusan, dan keberlanjutan kelembagaan lokal. Penulis perlu menjelaskan sumber data dan metode penilaian setiap indikator serta tidak menetapkan tingkat kemandirian tanpa bukti pendukung.

Sintesis analisis perlu menghubungkan setiap pernyataan dengan sumber yang dapat ditelusuri, seperti kode informan dan tanggal wawancara, identitas catatan observasi, atau judul dokumen beserta tahun penerbitannya. Temuan lapangan langsung harus dibedakan dari temuan penelitian terdahulu. Jika bukti beragam atau belum tersedia, ketidakpastian perlu disampaikan secara terbuka dan tidak diselesaikan melalui dugaan. Berdasarkan bukti yang saat ini tercantum dalam draf, tingkat kemandirian Desa Wisata Wonokitri belum dapat diverifikasi secara meyakinkan. Kesimpulan akhir perlu dibatasi pada indikator yang didukung catatan lapangan dan data resmi yang tersedia. Pernyataan mengenai sumber pendapatan utama rumah tangga, efektivitas promosi digital, atau

ketergantungan terhadap aktor eksternal memerlukan bukti yang spesifik.

Tabel 2. Ringkasan dimensi collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Wonokitri

Dimensi	Aspek yang Dianalisis dalam Konteks Wonokitri
Kondisi awal	Potensi wisata, riwayat kolaborasi/konflik, insentif partisipasi, serta perbedaan kewenangan dan sumber daya berdasarkan data lapangan berkode.
Desain kelembagaan	Aturan forum, partisipasi dan keterwakilan, prosedur pengambilan keputusan, transparansi, pembagian manfaat, pengaduan, dan akuntabilitas.
Kepemimpinan fasilitatif	Bukti penyelenggaraan forum, mediasi, fasilitasi dialog, dan dukungan bagi aktor yang memiliki sumber daya lebih terbatas; infrastruktur saja tidak cukup.
Proses kolaborasi	Contoh terverifikasi mengenai dialog, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, hambatan, dan hasil antara.
Kemandirian desa wisata	Kapasitas pengelolaan, manfaat ekonomi, kapasitas SDM, otonomi keputusan, dan keberlanjutan kelembagaan berdasarkan indikator dan data aktual.

Sumber: *Diolah berdasarkan catatan wawancara, observasi, dan dokumen penelitian yang sebenarnya; sumber sekunder perlu diidentifikasi secara terpisah.*

Artikel akhir perlu menyajikan temuan secara ringkas dan memberikan interpretasi, bukan sekadar mengulang abstrak, tabel ringkasan, dan kesimpulan. Setiap temuan perlu dihubungkan dengan kutipan data yang memiliki kode atau dokumen yang teridentifikasi. Pernyataan yang tidak dapat ditelusuri ke bahan penelitian perlu dihapus.

IV. PENUTUP

Penelitian ini menggunakan kerangka collaborative governance Ansell dan Gash (2008) untuk mengkaji pengembangan Desa Wisata Wonokitri. Kesimpulan akhir yang berbasis bukti perlu menjawab pertanyaan penelitian dengan merangkum (1) kondisi yang melatarbelakangi kolaborasi, (2) inklusivitas dan aturan pengaturan kelembagaan, (3) tindakan kepemimpinan fasilitatif, (4) proses kolaborasi yang terdokumentasi, dan (5) indikator kemandirian desa wisata yang didukung data. Pernyataan dalam kesimpulan hanya dapat difinalisasi setelah bukti data primer dan rincian sumber dilengkapi.

Rekomendasi perlu disusun berdasarkan temuan yang telah diverifikasi. Bergantung pada bukti penelitian, rekomendasi dapat mencakup penyusunan prosedur koordinasi yang lebih jelas, keterwakilan yang lebih inklusif, transparansi pembagian manfaat, pengembangan keterampilan secara berkelanjutan, dan pemantauan indikator kemandirian secara berkala. Peningkatan pendapatan usaha lokal tidak boleh dinyatakan apabila tidak didukung data pembanding.

PERNYATAAN PENULIS

Kontribusi Penulis

Mariatul Qibtia berkontribusi dalam perumusan gagasan, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, serta penyusunan draf artikel. Agus Prianto berkontribusi dalam pembimbingan akademik, penelaahan substansi, dan revisi kritis naskah. Seluruh penulis menelaah dan menyetujui naskah akhir. Pembagian kontribusi ini perlu dikonfirmasi oleh kedua penulis sebelum pengiriman.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan finansial, komersial, maupun personal yang dapat memengaruhi pelaksanaan penelitian, analisis data, interpretasi hasil, atau penyusunan artikel ini.

Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI)

Penulis mengakui penggunaan ChatGPT (OpenAI) sebagai alat bantu dalam penerjemahan dan penyuntingan bahasa, perapian struktur, serta pemformatan naskah. Alat tersebut tidak digunakan sebagai pengganti pengumpulan data, verifikasi sumber, maupun penilaian ilmiah penulis. Seluruh isi akhir, ketepatan data, interpretasi, dan tanggung jawab akademik tetap berada pada penulis. Kedua penulis perlu

meninjau dan menyetujui uraian penggunaan AI ini sebelum naskah dikirim.

Informasi Pendanaan

Informasi mengenai sumber pendanaan penelitian belum tercantum dalam dokumen sumber. Pernyataan pendanaan harus dikonfirmasi oleh penulis sebelum pengiriman; apabila penelitian sepenuhnya dibiayai secara mandiri, bagian ini dapat dinyatakan bahwa penelitian tidak menerima pendanaan khusus.

Poin-Poin Utama Penelitian

1. Penelitian ini mengkaji pengembangan Desa Wisata Wonokitri melalui empat dimensi collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2008): kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi.
2. Kemandirian desa wisata dianalisis melalui kapasitas pengelolaan, manfaat ekonomi lokal, kapasitas sumber daya manusia, otonomi pengambilan keputusan, dan keberlanjutan kelembagaan.

Ketersediaan Data dan Bahan

Data penelitian direncanakan bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pengembangan Desa Wisata Wonokitri. Ketersediaan data primer dan dokumen pendukung untuk dibagikan perlu dikonfirmasi oleh penulis. Data yang memuat identitas atau informasi pribadi informan hanya dapat diakses dengan memperhatikan persetujuan dan etika penelitian.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Wonokitri, pengelola Pokdarwis (Edelweiss Wonokitri Community Care Communication Forum), lembaga adat Tengger, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), dan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan atas keterbukaan dan kerja sama selama proses pengumpulan data. Terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal Wonokitri yang telah bersedia berbagi pengalaman, serta Program Studi Administrasi Publik Universitas Yudharta Pasuruan atas dukungan akademik selama penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al Haitami, A. K., & Trilaksana, A. (2026). Konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tahun 1982-2005: Tinjauan sosial, ekonomi, ekologi. Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah. 17 (2): 58-76.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory. 18 (4): 543-571. DOI: https://doi.org/10.1093/jopart/mum032.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Fasa, A. W., Berliandaldo, M., & Prasetio, A. (2022). Strategi pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia: Pendekatan analisis PESTEL. Jurnal Bali Membangun Bali. 1 (1): 71-87. DOI: https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i1.8.

Grandis, D., Hadi, N., & Meiji, N. H. P. (2023). Peran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Resort Wonokitri dalam pengelolaan ekowisata Edelweiss Park Desa Wonokitri Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S). 3 (5): 549-558. DOI: https://doi.org/10.17977/um063v3i52023p549-558.

Lestari, P. D., Setiyono, B., & Setiawan, A. (2026). Desakralisasi tari Sodoran dalam ritual Yadnya Karo: Transformasi makna dan identitas budaya masyarakat adat Tengger. Umbara. 11 (1): 20-32.

Marliani, L., Henriyani, E., & Djadjuli, R. D. (2025). Paradigma administrasi publik dalam teori dan praktek. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. 12 (2): 542-549.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.

Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. Jurnal Review Politik. 6 (2): 195-224.

Risfandini, A., Yulianto, I., & Wan-Zainal-Shukri, W. H. (2023). Local community empowerment for sustainable tourism development: A case study of Edelweiss Park Wonokitri Village. International Journal of Sustainable Development and Planning. 18 (11): 3617-3623.

Saleha, T. A., Pamungkas, N. K., Sukmawati, E. F., & Sukoco, S. A. (2022). Sosialisasi pengembangan potensi desa menjadi desa

wisata. Majalah Ilmiah Pelita Ilmu. 5 (1): 69-90.

Savitri, A. A. D., Wijaya, K. A. S., & Prabawati, N. P. A. (2024). Pengembangan pariwisata berbasis budaya melalui collaborative governance di Desa Wisata Penglipuran. Socio-Political Communication and Policy Review. 1 (5).

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.

Titania, N. R., Nur Kholis, M., & Elza, D. (2022). Peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. 8 (2): 111-120.

Vandayani, D. S., & Widiyarta, A. (2022). Collaborative governance dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai desa wisata di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan. 5 (1).

Copyright© 2026. This is an open access article un-der the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/li-censes/by-nc-sa/4.0/)